BAB II

PROFIL PT. PLN (Persero)

2.1 Sejarah PT. PLN (Persero)

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan Pembangkit Tenaga Listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas kemudian meluas dengan berdirinya dengan perusahaan swasta lainnya.

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia,Tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

Tanggal 1 Januari 1961 dibentuk BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas, saat itu kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No.17 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan diatas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.2 Visi, Misi dan Moto Perusahaan

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang maju tentunya memiliki Visi, Misi dan Moto yaitu sebagai berikut :

Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

Misi

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarkat.
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Moto

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity For a Better Life*).

2.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UPJ Ujungberung

Organisasi merupakan kerangka yang ada kaitannya dengan masalah perusahaan. Organisasi hendaklah disusun dengan membuat struktur organisasi yang menunjukkan fungsi-fungsi kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi ini dibuat berdasarkan fungsi dan kegiatannya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, dimana setiap fungsi terbagi lagi sesuai dengan kegiatannya. Dari tiap-tiap kegiatan serta fungsinya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, sebab kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Dengan demikian organisasi harus merupakan ketentuan dari hasil pertimbangan yang disepakati bersama agar mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Program kerja meliputi berbagai langkah kegiatan usaha yang meliputi semua bidang dengan memperhatikan hasil-hasil yang pernah dicapai dimasa-masa yang lalu. Disamping itu diperhatikan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penunjang usah-usaha untuk mengatasi hambatan tersebut.

Manajemen PT. PLN (Persero) UPJ Ujungberung terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut :

1. Manajer, yang memperoleh wewenang mengelola perusahaan secar penuh.
2. Staf Perusahaan, sebagai pembantu kepala dalam mengelola perusahaan

2.4 Uraian Pekerjaan

Dengan adanya pembagian kerja yang baik dan jelas maka kegiatan-kegiatan yang dijalankan akan lebih efisien dan efektif. Adapun tugas dan wewenang perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Manajer

   Mengarahkan dan mengkoordinasikan segala kegiatan perusahaan, mengambil suatu keputusan mengenai kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh perusahaan, kerjasama dengan pihak lain, mengawasi jalnnya perusahaan dan membawahi semua bagian yang ada di perusahaan.

2. Bagian Pelayanan Pelanggan

   Bagian Pelayanan Pelanggan adalah bagian yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara perhitungan besarnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat umum lainnya serta pelayanan pemberian penyambungan tenaga listrik, perubahan data yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

3. Bagian Penagihan

   Bagian Penagihan adalah bagian yang melakukan perencanan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lain/ rupa-rupa).

4. Bagian Bembacaan Meter

   Bagian Pembacaan Meter adalah bagian yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat pengukur meter kWh, meter kVArh, meter kVA maksimal, pada setiap pelanggan meter, serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu.

5. Bagian Penyambungan

   Bagian Penyambungan adalah bagian yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan penyambungan listrik yang diajukan pelanggan yang membutuhkan tenaga listrik.

6. Bagian Administrasi dan Keuangan

   Bagian Administrasi dan Keuangan adalah bagian yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan administrasi dan keuangan yang ada di PT. PLN (Persero).